



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS AHMADI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN III**
3. NHK : **429868**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 348 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5S/F602RM-G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 31B JUPITER Z-CW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA D1 B02N12L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 29.408.430**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.114.408.430

III. HUTANG Rp. 81.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.033.408.430

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.